

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 13 Agustus 2020, pemerintah Amerika Serikat (AS), Israel, dan Uni Emirat Arab (UEA) membuat pengumuman resmi bersama terkait serangkaian perjanjian atau kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel yang bernama *Abraham Accords*.¹ Pernyataan ini berisikan bahwa Israel dan UEA telah sepakat untuk melakukan normalisasi total hubungan mereka. Kurang lebih satu bulan kemudian, pada 11 September 2020, Bahrain juga mengumumkan niatnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.²³ Hingga September 2023, Bahrain, UEA, Sudan, dan Maroko merupakan negara-negara yang tergabung dalam rangkaian kesepakatan *Abraham Accords* ini.

Abraham Accords yang diinisiasi oleh AS tersebut dibentuk sebagai upaya dalam menyatukan sekutu regional AS di kawasan Timur Tengah atas dasar persepsi adanya ancaman yang sama dari kelompok Islam radikal, serta kelompok dan aktivitas regional Iran pada periode ketidakstabilan regional yang disebabkan oleh ketegangan antara AS dan Iran.⁴ Dengan adanya kesepakatan ini, muncul peran penting dalam memberikan *platform* kepada orang Yahudi dan Arab untuk bekerja menuju perdamaian.

Abraham Accords pada intinya tidak dimotivasi oleh faktor agama sesuai dengan namanya, melainkan didorong oleh tujuan kolektif para penandatangan untuk meningkatkan

¹ Yoel Guzansky dan Zachary A. Marshall, "The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications," *Israel Journal of Foreign Affairs* 14, no. 3 (1 September 2020), <https://doi.org/10.1080/23739770.2020.1831861>.

² Yoel Guzansky dan Zachary A. Marshall.

³ "Israel hopes US senior official's Saudi visit will lead to progress in Israel-Saudi normalization," *All Israel News*, Mei 2023, <https://allisrael.com/israel-hopes-us-senior-official-s-saudi-visit-will-lead-to-progress-in-israel-saudi-normalization>.

⁴ Sanam Vakil dan Neil Quilliam, "The Abraham Accords and Israel-UAE Normalization: Shaping a New Middle East," *Royal Institute of International Affairs*, 2023, <https://doi.org/10.55317/9781784135584>.

keamanan mereka.⁵ Dalam pertemuan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Menteri Luar Negeri Abdullatif Al Zayani, kedua negara sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik, peningkatan keamanan, menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan, serta memajukan kerukunan dan budaya perdamaian antara kedua negara.⁶ Dengan perjanjian ini, Bahrain dan Israel menyetujui serangkaian langkah yang mengawali babak baru dalam hubungan mereka. Kerajaan Bahrain dan Negara Israel telah sepakat dalam kesepakatan mengenai investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, teknologi, energi, perawatan kesehatan, budaya, lingkungan, dan bidang lain yang saling menguntungkan.

Sebelum secara resmi mengakui keberadaan Israel pada tahun 2020 melalui *Abraham Accords*, pandangan dan sikap Bahrain yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) terhadap Israel dipengaruhi oleh konflik Israel-Palestina.⁷ Bahrain mendukung perjuangan Palestina serta menentang kebijakan Israel terhadap wilayah Palestina. Bersama negara Arab lainnya, Bahrain bahkan ikut mengkritik tindakan-tindakan Israel dalam konflik tersebut, termasuk perluasan pemukiman, operasi militer, dan pendudukan wilayah Palestina.⁸

Kritik dari Bahrain yang dalam sejarahnya secara konsisten menolak pengakuan terhadap Israel salah satunya terdapat pada pertemuan PBB pada tanggal 29 November 2002.⁹ Duta besar Kerajaan Bahrain, Mohammed Saleh, memberikan kritik yang mengutuk tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Menurut Mohammed Saleh, Israel menjalankan kebijakan

⁵ Kishwar Munir dan Saira Cheema, "Abraham Accord and Its Implications: A Case Study of Bahrain," *University of Lahore, Journal of Politics and International Studies*, 7, no. 2 (2021): 33–46.

⁶ United States Department of State, "Abraham Accords: Declaration of Peace, Cooperation, and Constructive Diplomatic and Friendly Relations," 15 September 2020, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/Bahrain_Israel-Agreement-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf.

⁷ Huma Baqai dan Sabiha Mehreen, "Abraham Accords: A Journey From Arab-Israeli to Palestinian-Israeli Conflict," *JISR Management and Social Sciences & Economics* 19, no. 1 (30 Juni 2021): 113–26, <https://doi.org/10.31384/jisrmsse/2021.19.1.8>.

⁸ Baqai dan Mehreen.

⁹ Miriam Joyce, *Bahrain from the Twentieth Century to the Arab Spring* (New York: Palgrave Macmillan US, 2012), <https://doi.org/10.1057/9781137031792>.

pemukiman yang mengumpulkan orang-orang dari seluruh dunia untuk menggantikan warga Palestina di daerah pemukiman tersebut.¹⁰

Memasuki konteks sejarah keamanan politik nasional, Bahrain yang selama ini dipimpin oleh monarki Sunni turut diwarnai oleh berbagai pergolakan hingga saat ini. Perlu dicatat bahwa perbedaan antara aliran Sunni dan Syiah sesekali terjadi di Bahrain, perpecahan antara Syiah dan Sunni telah menjadi ciri khas negara ini sejak akhir tahun 1970-an.¹¹ Di kalangan pemerintahan Kerajaan Bahrain, terdapat persepsi bahwa Iran mencoba untuk mengganggu politik internal Bahrain.¹² Tuduhan ini berlandaskan pada peristiwa percobaan kudeta yang gagal pada tahun 1981 terhadap Bahrain yang membawa *Islamic Front for the Liberation of Bahrain* (IFLB) ke perhatian publik. Kejadian tersebut menjadi salah satu contoh pertama ketika pemerintah Bahrain secara terbuka menuduh Iran melakukan campur tangan dalam urusan internalnya. Pemerintah Bahrain menuduh Iran mencampuri urusan internalnya melalui IFLB yang menurut klaim Bahrain diberikan motivasi, insentif, arahan, perlengkapan, dan pelatihan oleh Iran.¹³

Memasuki tahun 2011, terjadi peristiwa demonstrasi besar yang dipimpin oleh beberapa golongan mayoritas Syiah dan beberapa golongan minoritas Sunni. Demonstrasi yang disebut *Bahrain Uprising* ini didorong oleh peristiwa *Arab Spring* dan menuntut dilakukannya reformasi dalam pemerintahan Bahrain menjadi lebih demokratis.¹⁴ Untuk menanggapi para demonstran, pemerintah Bahrain menempuh jalan paksaan terhadap para demonstran selama pemberontakan pada tahun tersebut.¹⁵ Peristiwa ini turut mendorong kekuatan regional, yaitu

¹⁰ Joyce.

¹¹ Hasan Tariq Alhasan, "The Role of Iran in the Failed Coup of 1981: The IFLB in Bahrain," *The Middle East Journal* 65, no. 4 (15 Oktober 2011): 603–17, <https://doi.org/10.3751/65.4.15>.

¹² Tariq Alhasan.

¹³ Tariq Alhasan.

¹⁴ M Ihsan Qadir, "Shaking Monarchy and Shouting Masses: Arab Spring and Bahrain Uprising 201," *Journal of the Research Society of Pakistan* 52, no. 2 (2015).

¹⁵ Kasbarian dan Mabon, "Contested Spaces and Sectarian Narratives in Post-Uprising Bahrain," *Global Discourse* 6, no. 4 (1 Oktober 2016): 677–96, <https://doi.org/10.1080/23269995.2016.1259232>.

Iran dan Arab Saudi, untuk memperebutkan pengaruh yang lebih besar di Bahrain, karena posisi geostrategisnya yang signifikan terletak sekitar 200 kilometer lepas pantai Iran dan 25 kilometer dari garis pantai Saudi. Perlu dicatat bahwa Bahrain merupakan salah satu negara Teluk yang memiliki posisi yang relatif berdekatan dengan Iran.

Untuk menanggapi isu krisis 2011, otoritas Bahrain kembali menuduh Iran sebagai penghasut kekacauan dan kekerasan di Bahrain dengan memberikan dukungan kepada kelompok Syiah selama periode tersebut.¹⁶ Persepsi tentang munculnya indikasi ancaman dari Iran tersebut menyebabkan pergeseran penting dalam perspektif keamanan antara beberapa negara Teluk, seperti Israel, UEA, dan Bahrain.¹⁷ Pergeseran ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakstabilan di Timur Tengah, yang memainkan kepentingan Iran yang berdampak buruk pada kesatuan GCC. Israel dan beberapa anggota GCC, termasuk Bahrain, menganggap bahwa perluasan pengaruh Iran merupakan ancaman utama dan mendesak di wilayah Teluk.¹⁸ Indikasi terkait kemunculan Iran dengan status sebagai sebuah ancaman di kawasan Teluk, terutama bagi Bahrain yang memiliki posisi geografis yang relatif dekat dengan Iran menjadi topik yang akan dibahas pada penelitian ini, yang kemudian juga akan diikuti dengan penjelasan mengenai kepentingan Bahrain dalam kesepakatan *Abraham Accords*.

1.2 Rumusan Masalah

Perspektif Bahrain yang merupakan salah satu anggota GCC mengenai Israel yang selama ini dianggap sebagai ancaman mulai mengalami pergeseran, hal ini digambarkan dengan tindakan pengakuan kedaulatan oleh Bahrain terhadap Israel melalui *Abraham Accords*. Dalam hal normalisasi hubungan tersebut, terdapat indikasi bahwa Bahrain mulai melihat adanya ancaman baru terhadap kepentingan nasionalnya yang bukan berasal dari

¹⁶ Kasbarian dan Mabon.

¹⁷ Andreas Krieg, *Divided Gulf: The Anatomy of a Crisis* (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2019).

¹⁸ Krieg.

permasalahan Israel. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian untuk menjelaskan faktor yang memfasilitasi normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dengan Israel.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka muncul pertanyaan penelitian berikut yang akan peneliti jawab: Mengapa Bahrain memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui *Abraham Accords*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mendasari keputusan Bahrain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui *Abraham Accords*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional bagi mahasiswa khususnya dalam memahami bagaimana perspektif Bahrain terhadap Iran dapat mempengaruhi keputusannya dalam menyetujui *Abraham Accords*.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan dan pengetahuan bagi para mahasiswa hubungan internasional terkait faktor pendorong sebuah negara dalam beraliansi serta sebagai bahan pertimbangan untuk para pembuat kebijakan untuk melihat faktor yang mendorong sebuah negara dalam pembentukan aliansi terutama terkait kasus Bahrain yang menyetujui *Abraham Accords*.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis topik penelitian, peneliti telah melakukan kajian literatur secara menyeluruh terhadap studi-studi yang relevan. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai titik referensi untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian. Beberapa karya yang dirujuk dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Artikel jurnal pertama yang peneliti gunakan adalah artikel jurnal *The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications* oleh Yoel Guzansky and Zachary A. Marshall¹⁹ yang berisikan analisis dampak dari adanya *Abraham Accords* di kawasan Timur Tengah. Penulis berpendapat bahwa kesepakatan yang menormalkan hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain tersebut memiliki implikasi langsung dan jangka panjang untuk kawasan tersebut. Signifikansi langsung dari kesepakatan terletak pada potensi peningkatan kerja sama ekonomi dan pariwisata antar negara. Normalisasi hubungan ini juga dapat mengarah pada kerja sama keamanan dan pembagian intelijen yang lebih besar. Penulis mencatat bahwa kesepakatan ini juga dapat menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan ini untuk mengikuti normalisasi hubungan mereka dengan Israel. Literatur ini mampu membantu peneliti dalam melihat dan menjelaskan lebih dalam mengenai isi, potensi, dan signifikansi dari kesepakatan *Abraham Accords* untuk dijadikan pembahasan.

Artikel jurnal kedua yang peneliti gunakan adalah jurnal artikel berjudul *Abraham Accord and its Implications: A Case Study of Bahrain*, yang ditulis oleh Kishwar Munir dan Saira J. Cheema²⁰. Artikel jurnal ini berisikan tentang *Abraham Accords* dan implikasinya, dengan penekanan khusus pada studi kasus di Bahrain. Secara khusus, artikel ini mengevaluasi perjanjian damai yang dibuat antara empat negara Arab (UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko) dan Israel, di bawah fasilitasi Amerika Serikat. Dokumen tersebut dirancang untuk membahas

¹⁹ Yoel Guzansky dan Zachary A. Marshall, "The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications."

²⁰ Munir dan Cheema, "Abraham Accord and Its Implications: A Case Study of Bahrain," 2021.

pertanyaan kunci, seperti peran Bahrain dalam proses perdamaian, motivasi di balik negara-negara seperti Bahrain yang bergabung dalam perjanjian tersebut, dan potensi manfaat yang dapat diperoleh negara-negara Arab dari inisiatif ini.

Untuk analisisnya, dokumen ini mengadopsi metodologi penelitian kualitatif dan mengandalkan sumber data sekunder. Artikel disusun menjadi tiga bagian utama: tinjauan literatur komprehensif yang memberikan wawasan tentang latar belakang sejarah Israel dan keadaan proses perdamaian saat ini; pembahasan mendetail yang berpusat pada keunggulan *Abraham Accords* dan faktor-faktor yang mempengaruhi di balik partisipasi Bahrain; dan terakhir, bagian yang didedikasikan untuk temuan yang menyoroti persepsi beberapa negara Timur Tengah terhadap pembentukan hubungan baik dengan Israel dan AS.

Sebagai kesimpulan, artikel ini memberikan analisis komprehensif tentang latar belakang, implikasi, dan signifikansi *Abraham Accords* yang berpusat pada perspektif unik Bahrain. Melalui pendekatannya yang sistematis, artikel tersebut membantu peneliti dalam memberikan informasi tentang kompleksitas diplomasi regional dan potensi dampaknya terhadap lanskap Timur Tengah yang lebih luas.

Artikel jurnal ketiga yang peneliti gunakan adalah artikel jurnal yang berjudul *Mutiny and Nonviolence in the Arab Spring: Exploring Military Defections and Loyalty in Egypt, Bahrain, and Syria* oleh Sharon Erickson Nepstad.²¹ Artikel tersebut menjelaskan bahwa situasi politik Bahrain mengalami gelombang protes dan perlawanan sipil pada tahun 2011 yang dipicu oleh peristiwa yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Kesimpulannya, protes dan perlawanan sipil yang meletus di Bahrain pada tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan sosial-ekonomi dan politik yang mengakar, dengan populasi muslim Syiah di negara itu berada di garis depan yang menuntut perubahan. Namun, monarki Khalifa yang didukung oleh

²¹ Sharon Erickson Nepstad, "Mutiny and Nonviolence in the Arab Spring: Exploring Military Defections and Loyalty in Egypt, Bahrain, and Syria," *Journal of Peace Research* 50, no. 3 (Mei 2013): 337–49, <https://doi.org/10.1177/0022343313476529>.

loyalitas militer yang didominasi Sunni dan dukungan militer asing sejauh ini telah mencegah pergantian rezim dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Artikel ini memberikan gambaran kepada peneliti mengenai situasi politik yang melanda Bahrain dalam sepuluh tahun terakhir. Situasi politik domestik seperti ini dapat mempengaruhi bagaimana pemerintahan resmi kerajaan Bahrain dalam memutuskan suatu kepentingan nasional dan kebijakannya, seperti perbedaan kepentingan antara kelompok Sunni dan Syiah di ranah domestik yang memandang pengaruh Iran sebagai suatu permasalahan.

Artikel jurnal keempat yang digunakan peneliti adalah sebuah artikel jurnal berjudul *Roles and International Behaviour: Saudi–Iranian Rivalry in Bahrain’s and Yemen’s Arab Spring* oleh Luíza Gimenez Cerioli.²² Artikel ini menggali persaingan antara Iran dan Arab Saudi dalam konteks Timur Tengah. Penulis artikel tersebut secara ekstensif meneliti hubungan multifaset antara kedua negara ini dan implikasi konsekuensial yang ditimbulkannya di kawasan regional. Aspek penting yang digarisbawahi dalam penelitian ini adalah peran signifikan yang dimainkan oleh golongan agama, yakni Syiah dan Sunni, dalam membentuk persaingan. Selain itu, penulis melakukan analisis mendalam tentang peran yang diambil oleh Iran dan Arab Saudi di kawasan Teluk, bersama dengan strategi masing-masing yang digunakan untuk menegaskan kepemimpinan regional. Dengan menyajikan penyelidikan menyeluruh terhadap faktor-faktor kunci ini, studi ini berusaha untuk menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika yang mendukung persaingan abadi dan manuver geopolitik antara Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah. Pemahaman yang lebih dalam tentang tindakan dan motivasi yang digali di dalam artikel sangat penting bagi peneliti untuk memahami konteks geopolitik Timur Tengah yang lebih luas.

²² Luíza Gimenez Cerioli, “Roles and International Behaviour: Saudi–Iranian Rivalry in Bahrain’s and Yemen’s Arab Spring,” *Contexto Internacional* 40, no. 2 (Agustus 2018): 295–316, <https://doi.org/10.1590/s0102-8529.2018400200010>.

Artikel jurnal kelima yang akan peneliti gunakan adalah *Bahrain and Iran - Saudi Arabia Controversy*²³ yang ditulis oleh Maia Kapanadze dan diterbitkan pada tahun 2021. Artikel jurnal ini membahas persaingan geopolitik antara Iran dan Arab Saudi, dengan fokus pada persaingan mereka terkait Bahrain. Kapanadze menyoroti faktor-faktor ideologis dan geopolitik yang berkontribusi pada konflik ini dan menjelajahi bagaimana hal itu memengaruhi hubungan antara negara-negara lain di wilayah tersebut. Artikel ini juga menekankan ketergantungan ekonomi dan keamanan Bahrain pada Arab Saudi, serta pengaruh Arab Saudi terhadap keputusan kebijakan luar negeri Bahrain. Tertulis di dalam artikel bahwa penulis menjelaskan peran keluarga Sunni Al-Khalifa yang berkuasa di Bahrain dan tantangan yang dihadapi oleh penduduk Syiah, sehingga secara keseluruhan memberikan wawasan tentang dinamika persaingan Iran-Arab Saudi dan dampaknya pada politik dan masyarakat Bahrain. Pada akhirnya analisis dari artikel ini dapat digunakan oleh peneliti dalam melihat pola hubungan antara Arab Saudi dan Iran serta keterlibatan Bahrain dalam hubungannya.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Balance of Threats*

Balance of threats merupakan kerangka teoritis dalam hubungan internasional dan studi keamanan yang dibangun atas dasar teori *balance of power*. Diperkenalkan oleh Stephen M. Walt dalam karyanya tentang pembentukan aliansi, teori *balance of threats* menyatakan bahwa negara-negara membentuk aliansi dan membuat keputusan keamanan berdasarkan ancaman yang dirasakan, bukan sekadar menyeimbangkan kekuatan.²⁴ Stephen M. Walt membedakan antara *balance of power* dan *balance of treats* dengan menyoroti bagaimana negara memandang dan menanggapi munculnya potensi konflik. *Balance of power* mengacu pada

²³ Maia Kapanadze, "Bahrain and Iran - Saudi Arabia Controversy," *Journal of Iran and Central Eurasia Studies* 4, no. 1 (2021).

²⁴ Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances* (Cornell University Press, 1987), <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt32b5fc>.

distribusi kekuatan di antara negara-negara atau aliansi untuk mencegah satu entitas menjadi terlalu dominan, dengan fokus utama pada kemampuan relatif dan kekuatan militer. Sebaliknya, *balance of threats* memperdalam konsep ini dengan menekankan bahwa negara lebih peduli dengan keinginan, kemampuan, dan tindakan negara lain. Menurut Walt, negara lebih cenderung menyeimbangkan diri terhadap ancaman yang dipersepsikan daripada sekadar untuk melawan kekuatan. Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih, dengan menggabungkan kemampuan material berupa sumber daya dan niat yang dipersepsikan dalam penilaian ancaman dan strategi penyeimbangan (*balancing*). Kenneth Waltz dalam buku *Theory of International Politics* menyatakan bahwa:²⁵

“Balance of power theory is often criticized because it does not explain the particular policies of states. True, the theory does not tell us why state X made a certain move last Tuesday. To expect it to do so would be like expecting the theory of universal gravitation to explain the wayward pattern of a falling leaf. A theory at one level of generality cannot answer questions about matters at a different level of generality.”

Dengan pendekatan *balance of threats*, Walt menilai bahwa pendekatan ini dapat menjelaskan lebih dalam konsep *balance of power* serta berfungsi sebagai landasan bagi teori kebijakan luar negeri, sehingga memungkinkannya menjelaskan atau memprediksi ancaman potensial mana yang paling mungkin diimbangi oleh suatu negara.²⁶

Dalam buku *Origins of Alliances*, Stephen Walt mendefinisikan aliansi sebagai “perjanjian formal atau informal untuk kerja sama keamanan antara dua atau lebih negara yang berdaulat,” dengan Walt menekankan aspek kooperatif dari perjanjian tersebut.²⁷ Terdapat beberapa ahli lain dalam mendefinisikan istilah “aliansi”, seperti Glenn Snyder yang menguraikan hal ini dengan menggambarkan aliansi sebagai “kesepakatan formal negara-negara untuk penggunaan (atau non-penggunaan) kekuatan militer, dalam keadaan tertentu, terhadap negara-negara di luar keanggotaan mereka sendiri,” yang menyoroti penggunaan

²⁵ Kenneth N Waltz, *Theory of International Politics* (Addison-Wesley Pub. Co., 1979).

²⁶ Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances*, 1987.

²⁷ Stephen M. Walt.

kekuatan militer secara strategis dalam kerja sama ini.²⁸ George Liska menambahkan bahwa aliansi adalah “kesepakatan bersama untuk saling mendukung secara militer jika terjadi ancaman atau konflik,” yang menunjuk pada komponen pertahanan bersama dari hubungan ini.²⁹ Robert Rothstein memandang aliansi sebagai “kesepakatan yang berfungsi untuk mengoordinasikan kebijakan dan tindakan antara negara-negara anggota untuk mengatasi masalah atau ancaman tertentu,” yang menunjukkan koordinasi kebijakan yang lebih luas di luar sekadar dukungan militer.³⁰ Dengan demikian, beberapa ahli dari bidang ilmu hubungan internasional seperti di atas secara kolektif menggambarkan aliansi sebagai perjanjian multifaset yang berpusat pada keamanan, kerja sama militer, dan tindakan kebijakan terkoordinasi di antara negara-negara berdaulat.

Walt turut memiliki pandangan bahwa aliansi umumnya dianggap sebagai respon terhadap sebuah ancaman (*balance of threats*), namun terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk respon tersebut. Ketika memasuki suatu aliansi, negara-negara dapat melakukan *balancing* (bersekutu sebagai oposisi terhadap sumber bahaya utama) atau *bandwagoning* (bersekutu dengan negara yang menjadi ancaman utama).³¹

Teori Walt ini relevan bagi kasus Bahrain karena dapat menjelaskan fenomena penyetujuan normalisasi hubungan Bahrain dengan Israel melalui *Abraham Accords* sebagai cara yang ditempuh oleh Bahrain dalam menanggapi kekuatan dan ancaman yang dibawa oleh Iran. Iran yang dalam sejarahnya telah melakukan berbagai tindakan agresif secara langsung terhadap Bahrain memunculkan pertimbangan bagi Bahrain bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik daripada perjanjian perdamaian ini, berbanding terbalik dengan perspektif terhadap Israel

²⁸ Glenn H. Snyder, *Alliance Politics* (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1997).

²⁹ George Liska, *Nations in Alliance: The Limits of Interdependence* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1968).

³⁰ Robert L. Rothstein, *Alliances and Small Powers* (New York: Columbia University Press, 1968).

³¹ Stephen M. Walt.

yang bukan merupakan pihak ancaman bagi kedaulatan Bahrain.³² Sikap Amerika Serikat yang menunjukkan dukungannya kepada negara-negara yang menjadi bagian dari perjanjian ini melalui akses terhadap persenjataan canggih turut memberikan keuntungan terhadap Bahrain dalam menanggapi ancaman Iran.³³ Keputusan Bahrain untuk memulihkan hubungan dengan Israel merupakan upaya untuk mendapatkan sekutu berpengaruh sebagai respons terhadap oposisi dari rezim Al-Khalifa. Al-Khalifa menyalahkan Iran atas dukungan terhadap protes-protes yang menentang rezim, dan kemudian mencari dukungan dari Israel untuk mendukung mereka dan membantu mengatasi konflik politik di masa depan.³⁴

Karena *balancing* dilihat sebagai respons terhadap ancaman dan memenuhi beberapa poin penting sebagai suatu bentuk aliansi, Walt beranggapan bahwa penting untuk mempertimbangkan faktor lain yang akan mempengaruhi tingkat ancaman yang mungkin dibawa oleh negara-negara, seperti *aggregate power* (kekuatan keseluruhan), *geographic proximity* (kedekatan geografis), *offensive power* (kekuatan ofensif), dan *aggressive intentions* (keinginan agresif).³⁵

³² Raphael Ahren dan Toi Staff, "Landing in Bahrain to Sign Deal, Israeli Official Stresses 'Genuine Peace' Hopes," news, The Times of Israel, 18 Oktober 2020, <https://www.timesofisrael.com/landing-in-bahrain-top-israeli-official-says-jerusalem-seeks-genuine-peace/>.

³³ Munir dan Cheema, "Abraham Accord and Its Implications: A Case Study of Bahrain," 2021.

³⁴ Shiza Ahmed Butt, "Abraham Accords: Strategic Realignment within Middle East," *CISS Insight Journal* 10, no. 1 (26 September 2022), <https://journal.ciiss.org.pk/index.php/ciiss-insight/article/view/215>.

³⁵ Stephen M. Walt.

1.7.1.1 *Aggregate Power*

Kekuatan secara keseluruhan digambarkan dengan situasi seperti semakin besar sumber daya total suatu negara (populasi, kemampuan industri, militer, serta teknologi), maka semakin besar potensi ancaman yang dapat dihadapkannya bagi negara lain.³⁶ Negara-negara dengan kekuatan besar memiliki kapasitas besar dalam melancarkan serangan kepada musuh atau memberikan bantuan kepada aliansi. Dengan demikian, kekuatan keseluruhan suatu negara dengan sendirinya menurut Walt mungkin memberikan motif untuk melakukan *balancing*.

1.7.1.2 *Geographic Proximity*

Sejalan dengan pendapat Harvey Starr dan Benjamin A. Most,³⁷ Walt mengungkapkan bahwa karena kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan menurun seiring bertambahnya jarak, negara-negara yang berdekatan dapat menghadirkan ancaman yang lebih besar daripada yang berjarak jauh.³⁸ Negara-negara lebih mungkin untuk membuat pilihan aliansi mereka sebagai respon terhadap kekuatan yang berdekatan daripada sebagai respons terhadap yang berjarak.

1.7.1.3 *Offensive Power*

Faktor ini adalah bagian dari kekuatan agregat yang secara khusus dimobilisasi untuk melakukan tugas militer. Faktor ini ditandai dengan kemampuan untuk menyebabkan kerusakan pada integritas teritorial dan kedaulatan negara lain dengan kerugian yang dapat diterima. Semakin besar kemampuan serang suatu negara, semakin besar kemungkinannya untuk memprovokasi pembentukan aliansi, dan sebaliknya.³⁹ Kemampuan serangan juga erat kaitannya tetapi tidak identik dengan kekuatan keseluruhan. Secara khusus, kemampuan serangan adalah kemampuan untuk mengancam kedaulatan atau integritas wilayah negara lain

³⁶ Stephen M. Walt.

³⁷ Harvey Starr dan Benjamin A. Most, "The Substance and Study of Borders in International Relations Research," *International Studies Quarterly* 20, no. 4 (Desember 1976): 581, <https://doi.org/10.2307/2600341>.

³⁸ Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances*, 1987.

³⁹ Stephen M. Walt.

dengan risiko yang dapat diterima. Kemudahan dengan mana kekuatan keseluruhan dapat diubah menjadi kemampuan serangan (yaitu, dengan mengumpulkan kemampuan militer besar dan mobilisasinya) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keuntungan relatif antara serangan dan pertahanan pada periode tertentu.

1.7.1.4 *Aggressive Intentions*

Menurut Walt, niat agresif dari suatu negara umumnya tidak dapat dilihat secara fisik, faktor ini dapat dilihat melalui kebijakan dan tindakan dari negara lain. Niat agresif dari negara dapat menyebabkan negara-negara lain melakukan balancing. Keinginan dari suatu negara memainkan peran penting dalam memilih sekutu.⁴⁰

Akhirnya, negara-negara yang dianggap agresif cenderung memprovokasi negara-negara lain untuk melakukan keseimbangan terhadap mereka. Persepsi tentang niat cenderung memainkan peran yang sangat penting dalam pilihan aliansi. Ketika suatu negara dianggap memiliki niat yang tidak dapat diubah untuk bersifat agresif, negara-negara lain mungkin tidak akan bergabung. Bagaimanapun juga, jika niat seorang aktor yang agresif tidak dapat diubah melalui aliansi dengannya, negara yang rentan, bahkan jika bersekutu, cenderung akan menjadi korban. Menyeimbangkan dengan negara-negara lain mungkin menjadi satu-satunya cara untuk menghindari situasi ini.

Pada kasus Bahrain dan *Abraham Accords*, hal serupa terjadi di mana Bahrain memutuskan untuk membentuk dan memperbaiki hubungan dengan Israel yang merupakan negara yang memiliki kekuatan di kawasan Teluk.

1.7.2 *Situasi pendorong terjadinya balancing*

Walt turut menjelaskan bahwa terdapat situasi dan kondisi di mana sebuah negara akan melakukan tindakan balancing, seperti:⁴¹

⁴⁰ Stephen M. Walt.

⁴¹ Stephen M. Walt.

1. Balancing memiliki bentuk umum yang berupa ketika suatu negara menghadapi bahaya eksternal, mereka akan berkolaborasi dengan negara lain untuk melawan negara yang mengancam tersebut.
2. Semakin besar probabilitas dukungan dari aliansi, semakin besar kecenderungan untuk melakukan balancing.
3. Semakin agresif tindakan dari suatu negara, semakin besar kecenderungan bagi negara lain untuk melakukan balancing terhadapnya.
4. Negara-negara lebih cenderung melakukan balancing pada saat masa damai, atau pada tahap awal masa perang. Pada masa-masa seperti ini, mereka berusaha untuk menghalangi atau mengalahkan kekuatan yang memberikan ancaman terbesar.⁴²

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan memakai pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut John W. Creswell dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka interpretatif atau teoretis yang membimbing penelitian mengenai masalah penelitian yang menyangkut makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia.⁴³

Dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” oleh Moleong, Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian kualitatif menekankan pemahaman holistik yang bersumber dari konteks alamiah, melibatkan manusia sebagai instrumen penelitian, menerapkan analisis data secara deduktif, menitikberatkan pada proses daripada hasil penelitian, serta memerlukan kesepakatan

⁴² Stephen M. Walt.

⁴³ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 3rd ed (Los Angeles: SAGE Publications, 2013).

antara peneliti dan subjek penelitian yang harus relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.⁴⁴

1.8.1 Jenis Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif analisis, sebagaimana didefinisikan dalam buku "Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D" oleh Sugiyono. Jenis penelitian dengan analisis deskriptif berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek yang sedang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang sudah terkumpul, tanpa melakukan analisis yang mendalam atau membuat kesimpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain, penelitian analisis deskriptif mengidentifikasi masalah atau memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada saat penelitian berlangsung, dan hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.⁴⁵

Dengan menggunakan pendekatan ini nantinya peneliti akan mengumpulkan data dan informasi terkait faktor pendorong Bahrain dengan ditandatanganinya *Abraham Accords*. Data yang dikumpulkan terkait latar belakang situasi kontemporer politik Bahrain, keadaan terkini dari geopolitik negara-negara Timur Tengah, hingga dampak kesepakatan terhadap keamanan regional dan kepentingan ekonomi akan dianalisis dan dideskripsikan. Kemudian peneliti akan mengidentifikasi deskripsi dari data yang didapatkan dan membuahkan hasil pada kesimpulan.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberi batasan pada faktor pendorong Bahrain dalam menyetujui *Abraham Accords* pada aspek kepentingan nasional seperti keamanan, kepentingan ekonomi domestik dan regional. Batasan waktu dari penelitian ini adalah pada rentang tahun 2020 hingga saat penelitian ini dibuat. Pemilihan rentang waktu penelitian ini

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁴⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Jakarta: Alfabeta, 2009).

diakibatkan oleh fakta bahwa *Abraham Accords* ini mulai ditandatangani pada tahun 2020, dan merupakan peristiwa yang masih terus berjalan hingga saat ini.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Menurut Earl Babbie,⁴⁶ unit analisis merujuk pada unsur atau entitas yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Entitas ini akan menjadi fokus analisis dan dasar untuk menarik kesimpulan. Unit analisis dapat bervariasi tergantung pada pertanyaan penelitian dan variabel yang diteliti. Hal itu bisa berupa individu, kelompok, organisasi, interaksi sosial, negara, atau bahkan konsep abstrak seperti budaya atau masyarakat. Sedangkan untuk level analisis, Ahmet Nuri Yurdusev menulis bahwa level analisis merupakan masalah yang terkait dengan kerangka/konteks analisis dan tingkat di mana seseorang melakukan analisisnya.⁴⁷ Menurut John Spanier, terdapat beberapa tingkatan atau level analisis, seperti tingkat individu, tingkat negara, dan tingkat sistem.⁴⁸

Kajian ini akan berfokus pada Bahrain sebagai unit analisis tingkat negara yang akan dianalisis dan dijelaskan perilakunya sebagai sebuah negara. Peneliti turut menggunakan unit eksplanasi yang menurut Mas'ood, Roselle, dan Spray sebagai unit yang memberikan dampak terhadap unit analisis atau disebut juga dengan variabel independen untuk menjelaskan faktor pendorong dalam tindakan pembukaan hubungan diplomasi oleh Bahrain terhadap Israel.^{49,50}

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dari berbagai situs resmi pemerintahan, seperti

⁴⁶ Earl R. Babbie, *The Practice of Social Research*, Fourteenth edition (Boston, MA: Cengage Learning, 2016).

⁴⁷ Ahmet Nuri Yurdusev, "Level of Analysis and Unit of Analysis: A Case for Distinction.," *Millennium* 22, no. 1 (1993): 77–88, <https://doi.org/10.1177/03058298930220010601>.

⁴⁸ Joaquin L. Gonzalez III, "A Review of John W. Spanier's "Three Levels of Analysis:"," *Philippine Political Science Journal* 15, no. 1 (1989): 89–97, <https://doi.org/10.1163/2165025X-0150102007>.

⁴⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁵⁰ Sharon L. Spray dan Laura Roselle, *Research and Writing in International Relations*, 2nd ed (Boston: Pearson Longman, 2012).

Ministry of Foreign Affairs of Bahrain, Ministry of Foreign Affairs of Israel, hingga U.S Department of State. Peneliti turut menggunakan data primer melalui akun dan kanal *YouTube* resmi dari Kerajaan Bahrain, Pemerintah Israel, dan Pemerintah Amerika Serikat.

Selanjutnya, penelitian ini juga dipadukan dengan menggunakan temuan data sekunder yang merupakan data yang berasal dari temuan para peneliti dan pengumpul data sebelumnya yang dikumpulkan kembali oleh peneliti pada saat ini yang berupa *e-book*, media berita lokal dan internasional, artikel dan jurnal *online*, serta laporan dan dokumen resmi di internet terkait tindakan Bahrain dalam *Abraham Accords* yang dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci seperti *Bahrain*, *Abraham Accords*, *Normalization*, *Israel*, dan *Iran*.

Adapun untuk buku dan *e-book*, peneliti menggunakan beberapa buku seperti *Bahrain from the Twentieth Century to the Arab Spring*, *Divided Gulf: The Anatomy of a Crisis*, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, *Restraining Great Powers: Soft Balancing from Empires to the Global Era*, *The Origins of Alliances*, *Saudi Arabia and Iran: The struggle to shape the Middle East*, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*, dan *The Balance of Power: History and Theory*.

Dalam mengumpulkan data dari media berita lokal dan internasional, peneliti menggunakan portal berita *online* seperti *Al-Jazeera*, *Voice of Bahrain*, *Bahrain News Agency*, *Gulf News*, *Gulf Daily News*, *The Daily Tribune News of Bahrain*, *Biz Bahrain*, *BBC*, *NPR*, *The Diplomat*, *Washington Post*, *Global Times*, *The Jerusalem Post*, *Middle-East Monitor*, *Jewish News Syndicate*, dan *Foreign Affairs*.

Untuk kategori jurnal ilmiah, peneliti menggunakan sumber artikel yang diterbitkan oleh *Journal of Politics and International Studies*, *International Security*, *Journal of Iran and Central Eurasia Studies*, *Global Discourse*, *Insignia: Journal of International Relations*, *Journal of Peace Research*, *Contexto Internacional*, *Journal of the Research Society of Pakistan*, *Israel Journal of Foreign Affairs*, dan *The Middle East Journal*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti kerangka kerja Miles and Huberman. Menurut perspektif Miles dan Huberman, analisis data dalam konteks penelitian kualitatif dilakukan sepanjang proses pengumpulan data, serta setelah pengumpulan data selesai dalam suatu periode tertentu. Kegiatan analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai tingkat kejenuhan.

1. **Reduksi Data:** Reduksi data merupakan tahap pertama dalam proses analisis. Ini melibatkan rangkuman informasi, pemilihan elemen yang relevan, dan pemusatan perhatian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, penelitian mencari pola dan tema yang muncul dalam data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, serta memudahkan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memerlukan pemikiran kritis serta pemahaman yang mendalam.
2. **Penyajian Data:** Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format seperti tabel, grafik, diagram alur, atau piktogram. Melalui penyajian data ini, data dapat diorganisir, pola hubungan antar elemen data dapat dijelaskan, sehingga memudahkan pemahaman. Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering kali menggunakan teks yang bersifat naratif untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, meskipun kadang-kadang dapat pula menghasilkan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas terkait dengan objek penelitian yang sebelumnya masih samar, sehingga setelah dilakukan penelitian, objek tersebut menjadi lebih terdefiniskan.

Analisis penelitian setelah data-data yang didapatkan sebelumnya diolah menggunakan teknik analisis data, akan difokuskan pada situasi terkini dari hubungan Bahrain dengan Israel, keadaan politik kawasan terkait, hingga pemaparan isi dari perjanjian *Abraham Accords*. Memasuki tahap berikutnya, informasi tersebut akan dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan kerangka konseptual *Balance of Threats* yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt. Peneliti kemudian akan menyelidiki dan membuktikan bahwa kerangka konseptual *Balance of Threats* sesuai dengan situasi politik domestik dan regional dari perspektif Bahrain.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran tentang latar belakang masalah penelitian, mendefinisikan masalah, menyajikan pertanyaan dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Tinjauan literatur turut disajikan yang akan dilakukan untuk meninjau tulisan ilmiah yang ada dan penelitian yang relevan dengan topik. Kerangka konseptual akan diperkenalkan sebagai alat analisis untuk penelitian ini. Bab ini juga akan membahas tentang definisi masalah, unit dan level analisis, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Akhirnya, bab ini akan memberikan pendekatan sistematis untuk menulis penelitian.

BAB II SITUASI BAHRAIN DI KAWASAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ISRAEL DAN IRAN PRA-ABRAHAM ACCORDS

Bab dua dalam penelitian ini akan menjelaskan keadaan yang dimiliki oleh Bahrain sebagai sebuah negara dalam lingkup kawasan Timur Tengah, serta hubungan Bahrain dengan Israel sekaligus Iran dalam konteks sejarah. Peneliti di bagian ini akan melakukan eksplorasi serta turut menjelaskan bagaimana dinamika interaksi dan perspektif Bahrain terhadap Israel dan Iran sebelum adanya *Abraham Accords*. Dalam bab ini juga terdapat berbagai temuan yang akan disajikan oleh peneliti sebagai tinjauan

lebih jauh mengenai profil dari ketiga negara tersebut, terutama dalam aspek kekuatan untuk bertahan sebagai sebuah negara yang berada di lingkungan kawasan yang rawan akan konflik.

BAB III NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK BAHRAIN DENGAN ISRAEL DALAM ABRAHAM ACCORDS

Pada bab tiga dalam penelitian ini akan melanjutkan penjelasan dan mengkaji lebih dalam mengenai sejarah yang melatarbelakangi pembentukan *Abraham Accords* secara umum, isi, serta poin penting yang terdapat di dalamnya, terutama spesifik mengenai perjanjian Israel dengan Bahrain dalam *Abraham Accords*, hingga berbagai bahan temuan yang akan memberikan pengetahuan terhadap topik pembahasan.

BAB IV ANALISIS FAKTOR PENDORONG BAHRAIN DALAM MENANDATANGANI ABRAHAM ACCORDS

Bab ini memberikan analisis mengenai faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain dan Israel dengan adanya *Abraham Accords*. Topik akan dianalisis menggunakan kerangka konsep *Balance of Threats* oleh Stephen M. Walt yang berbicara mengenai perilaku sebuah negara ketika adanya kelahiran potensi ancaman, pertimbangan bagi negara tersebut untuk mendefinisikan ancaman yang muncul, hingga perilaku aliansi berupa penyeimbangan (*balancing*) untuk menanggapi ancaman yang muncul.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan